



Journal of Government Science Studies
Available online at <https://ojs3.unpatti.ac.id/>
Vol. 1 No. 2, Oktober 2022, pages: 77-85
e-ISSN: 2827-847X, p-ISSN: 2827-8461
<https://doi.org/10.53730>



Partisipasi Masyarakat dalam Program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga di Kelurahan Wandoka Kabupaten Wakatobi

Eka Setianingsi^a, Nastia^a, Muh. Askal Basir^a

Email Corespondensi: ekasetianingsi01@gmail.com

Manuscript submitted: 31-05-2022, Manuscript revised: 08-06-2022, Accepted for publication: 28-10-2022

Keyword:
Women's
Participation 1;
PKK Empowerment 2;
Community Welfare 3.

Abstract: *This study aims to determine the participation of women in the Family Welfare Empowerment Program in North Wandoka Village, Wangi-Wangi District, Wakatobi Regency. This research uses descriptive research with a quantitative approach, which is a research method used to examine the condition of natural objects, so the researcher is the key instrument. The findings show that community involvement in the primary PKK program went quite well, because of the community's knowledge to participate through involvement in events carried out by the PKK driving team in North Wandoka Village. Furthermore, community involvement in the main PKK program can be considered as community self-help, both in terms of manpower and supplies. The problem in North Wandoka Village is the lack of public education. It is recommended that the involvement of the North Wandoka Village community in the PKK program be increased again, and the PKK mobilizing team as the executor of tasks in North Wandoka Village to maximize community involvement in various activities.*

Kata Kunci:
Partisipasi
Perempuan 1;
Pemberdayaan PKK 2;
Kesejahteraan
Masyarakat 3.

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Partisipasi Perempuan Terhadap Program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga di Kelurahan Wandoka Utara Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif, yaitu suatu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alami, maka peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Temuan menunjukkan bahwa pelibatan masyarakat dalam program PKK primer berjalan cukup baik, karena pengetahuan masyarakat untuk berpartisipasi melalui keterlibatan dalam acara yang dilakukan oleh tim penggerak PKK di Kelurahan Wandoka Utara. Selanjutnya, pelibatan masyarakat dalam program utama PKK dapat dianggap sebagai swadaya masyarakat, baik dari segi tenaga kerja maupun perbekalan. Permasalahan di Kelurahan Wandoka Utara adalah kurangnya pendidikan masyarakat. Disarankan agar keterlibatan masyarakat Kelurahan Wandoka Utara dalam program PKK ditingkatkan lagi, dan tim penggerak PKK sebagai pelaksana tugas di Kelurahan Wandoka Utara lebih memaksimalkan keterlibatan masyarakat dalam berbagai kegiatan.

^a Universitas Muhammadiyah Buton, Indonesia

1 Pendahuluan

Sebuah keluarga adalah kelompok sosial, keluarga terdiri dari orang-orang yang berkomunikasi dan berkomunikasi dalam rangka membangun fungsi sosial. Sekelompok keluarga akan menciptakan lapisan budaya, dan lapisan budaya ini akan bersatu dalam jumlah besar untuk membentuk sebuah negara (Prasetyaningsih, 2020). Berhasil atau tidaknya suatu bangsa ditentukan oleh perkembangan generasi sekarang dan yang akan datang.

Salah satu tugas dalam membina keluarga dalam keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak adalah tugas ibu. Karena dia seorang wanita, seorang ibu menghabiskan lebih banyak waktu di rumahmu daripada seorang ayah. Akibatnya, perempuan harus mampu mengatur kehidupan rumah tangganya, terutama sebagai pengasuh anak dan otoritas pengatur konsumsi makanan dalam rumah tangga (Hertika et al., 2021). Mengurus keluarga perempuan membutuhkan pengetahuan, studi, dan kompetensi.

Sesuai dengan kemajuan zaman, perempuan kini memiliki potensi yang sama dengan laki-laki. Secara hukum, perempuan Indonesia sama-sama tertarik pada laki-laki agar dapat berpartisipasi dan maju di segala bidang kehidupan. Pasal 21 dan 27 UUD 1945 memberikan hak dan kewajiban yang sama kepada setiap individu di bidang ketenagakerjaan, kesehatan dan kesejahteraan, politik dan hukum nasional, serta hak-hak individu, tanpa memandang jenis kelamin. Sebagai warga negara dan pekerja pembangunan, perempuan memiliki hak, kewajiban, dan kesempatan yang sama dengan laki-laki dalam kehidupan dan proyek pembangunan nasional.

Keterlibatan perempuan dalam perencanaan pembangunan masih relatif rendah, sehingga inisiatif yang menguntungkan perempuan belum pernah terjadi dalam proyek pemberdayaan masyarakat. Perempuan masih disibukkan dengan masalah rumah tangga dan keluarga, serta pengetahuan yang masih cukup rendah (Lebetubun, 2022). Beberapa mekanisme tim perempuan di pedesaan dan perkotaan antara lain pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK). PKK adalah organisasi yang dipimpin perempuan yang mempromosikan kesejahteraan keluarga dalam budaya dengan membangun, mempertahankan, dan memelihara keluarga. Tujuan dasar PKK adalah kesejahteraan keluarga (Pathony, 2020). Hal ini disebabkan karena keluarga merupakan unit budaya terkecil yang memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja pembangunan; dari keluarga yang efektif ini, kehidupan berbangsa dan bermasyarakat akan menghasilkan ketentraman dan kedamaian. Akibatnya, kesejahteraan keluarga menjadi salah satu barometer untuk mengukur kemajuan pembangunan.

Proses pemberdayaan masyarakat melalui pemberdayaan dan gerakan kesejahteraan keluarga sesuai dengan teori Pemberdayaan sebagai proses yang dikemukakan oleh Edi Suharto yaitu Proses pemberdayaan masyarakat melalui gerakan Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan (Pathony, 2020). Pemerintah telah mengembangkan sejumlah program dan lembaga untuk membantu masyarakat, salah satunya adalah PKK yang beroperasi di seluruh Indonesia. Organisasi ini dikenal di masyarakat, dan pada tahun 2007 mendapatkan penghargaan dari berbagai organisasi internasional (WHO, Unicef, dan Unesco) atas kemampuannya untuk melibatkan laki-laki dan perempuan dalam upaya menciptakan negara yang berkembang, maju, dan mandiri. keluarga berkecukupan melalui sepuluh program utamanya.

Secara historis, PKK merupakan singkatan dari Pendidikan Keluarga Sejahtera, yang dimaksudkan untuk meningkatkan keterlibatan perempuan melalui program pendidikan bagi perempuan. Perubahan nama organisasi menjadi Pengembangan Kesejahteraan Keluarga pada 27 Desember 1972, dengan tujuan membina dan membina keluarga dalam bidang mental, spiritual, dan fisik, serta meningkatkan kualitas pangan, sandang, kesehatan, dan lingkungan. Anggotanya antara lain tokoh masyarakat, istri Kepala Dinas, dan istri Kepala Daerah sampai tingkat Desa dan Kecamatan yang kegiatannya dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Penjaminan kelestarian lingkungan dilakukan melalui diskusi antara manajemen, pemerintah, dan masyarakat mengenai proses pembangunan yang akan ditempuh agar tidak

merusak lingkungan fisik. Menjaga Karakter dan Budaya Tempat Sebaiknya pemerintah senantiasa memberikan ruang bagi masyarakat untuk melestarikan budayanya, selain bantuan materi dan kebijakan (Salma et al., 2022).

Selanjutnya dengan adanya reformasi serta standar baru dan semangat kemandirian daerah, akronim PKK diubah kembali menjadi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga sejak tahun 1999. Kata-kata tersebut dipetik sebagai hasil dari pemahaman yang sistematis dan upaya terorganisir untuk mengatasi pencapaian dan keadilan seks dalam kehidupan keluarga, masyarakat, bangsa, dan peradaban.

PKK merupakan salah satu lembaga kemasyarakatan setempat, dan Kelurahan merupakan mitra pemerintah dalam organisasi kemasyarakatan, sesuai Paradigma Nomor 5 Tahun 2007. PKK berperan membantu pemerintah desa dan kecamatan dalam meningkatkan kesejahteraan jasmani dan rohani dalam rangka mewujudkan keluarga yang berbudaya, bahagia, sejahtera, mandiri, dan harmonis, serta berperan dalam mengembangkan potensi dan peran perempuan dalam meningkatkan pendapatan keluarga (Dzikrillah & Ansori, 2018).

Apa yang tertuang dalam 10 Program Pokok PKK dan definisi operasionalnya dapat dilaksanakan secara konseptual secara efektif, namun dalam praktiknya, sebagian besar program tersebut belum berfungsi sebagaimana mestinya. Sebab, 10 program dasar PKK tersebut jarang dipahami secara profesional (Sunaryo, 2020).

Tujuan utama PKK adalah kesejahteraan keluarga. Hal ini karena keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat yang memiliki dampak signifikan terhadap kinerja pembangunan dalam mendukung inisiatif pemerintah. Kehidupan berbangsa dan bernegara akan mampu melahirkan ketentraman, keamanan, kerukunan, dan ketenangan dari keluarga kaya ini (Sunaryo, 2020). Alhasil, kesejahteraan keluarga menjadi salah satu indikator kemajuan melalui inisiatif pemerintah. PKK adalah gerakan yang menghimpun data penduduk, ibu hamil, bayi dan balita, kelahiran, kematian, dan peristiwa kemasyarakatan dalam rangka membantu dan mendukung pelayanan pemerintah.

Pelibatan masyarakat merupakan salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat secara aktif yang bertujuan untuk mencapai tujuan pembangunan yang dipimpin oleh masyarakat (Nastia et al., 2022). Peran PKK dalam meningkatkan pemberdayaan perempuan cukup berhasil dilaksanakan, demikian pula perannya dalam pemberdayaan masyarakat, terlihat dari pemberdayaan life skill berupa penyuluhan dan keterampilan, melakukan pelatihan, dan pemasaran (Mulyati & Suhaety, 2021). Menurut Soetomo, *community engagement* mencakup keterlibatan dalam keseluruhan proses pembangunan, dimulai dengan pengambilan keputusan dalam mengenali masalah dari kebutuhan, desain program, pelaksanaan program, dan menilai serta menikmati hasilnya (Masyarakat, 2021). Keterlibatan masyarakat dalam penelitian ini mengacu pada keterlibatan masyarakat pada tahap pelaksanaan program Bimbingan Keluarga Sejahtera.

Aktivitas Program PKK di Kelurahan Wandoka, ketua PKK setempat telah melakukan segala daya untuk memastikan bahwa tindakan PKK dilakukan. Namun, terdapat tantangan, seperti tingkat pendidikan masyarakat Desa Wandoka yang masih rendah. Menurut pengamatan dilapangan, masyarakat masih kurang memahami PKK. Akibatnya, mereka terlalu malas untuk mengikuti kegiatan PKK. Secara umum, tingkat pendidikan mereka masih kurang.

Saat ini, PKK terlihat berjalan cukup efektif dan sesuai dengan persyaratan yang diberikan; namun berdasarkan sumber daya manusia yang ada, tidak semuanya memiliki kompetensi dan kapasitas untuk melaksanakan, mengoperasikan, dan membimbing masyarakat. Masalah lain yang muncul adalah banyak anggota yang tidak mau terlibat atau terlibat dalam Program ini. Misalnya, daripada pergi keluar dan berpartisipasi dalam berbagai kegiatan yang direncanakan oleh tim, mereka lebih sering tinggal di rumah. Di sisi lain, kurangnya antusiasme dari pemerintah dan kurangnya tim PKK menyebabkan masyarakat lamban dan ragu untuk berpartisipasi dalam kegiatan PKK. Selain itu, terdapat persoalan lain seperti tingkat pendidikan masyarakat Kelurahan

Wandoka yang masih rendah. Oleh karena itu, kegiatan PKK merupakan salah satu upaya tim penggerak PKK untuk mensejahterakan masyarakat setempat.

2 Metode Penelitian

Peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif karena penelitian deskriptif kualitatif merupakan suatu metode penelitian dimana penelitian bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis tentang bagaimana partisipasi perempuan terhadap program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga di Kelurahan Wandoka Utara Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi. Untuk mendukung keperluan penganalisisan dan penelitian ini, penulis memerlukan sejumlah data, baik dari dalam maupun luar organisasi. Untuk memperoleh data dan informasi dalam penelitian ini, penulis melakukan pengumpulan data dengan observasi, wawancara, studi dokumen.

Data dari hasil wawancara yang diperoleh kemudian dicatat dan dikumpulkan sehingga menjadi sebuah catatan lapangan. Teknik ini bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis fakta-fakta dan data yang diperoleh. serta hasil-hasil penelitian baik dari hasil studi lapangan maupun studi literatur untuk kemudian memperjelas gambar hasil penelitian. Menurut Sugiono, (2016:294) mengatakan bahwa selama peneliti melakukan pengumpulan data di lapangan, peneliti juga melakukan analisis data. Semua data yang telah didapat kemudian diolah melalui tiga jalur analisis data kualitatif yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan

3 Hasil dan Diskusi

Keterlibatan masyarakat mencakup keterlibatan di seluruh proses pembangunan, dimulai dengan pengambilan keputusan dalam mengidentifikasi kebutuhan, berlanjut ke perencanaan program, pelaksanaan, dan evaluasi, dan akhirnya menikmati hasilnya (Lawelai, 2021).

Keterlibatan masyarakat, menurut pengertian partisipasi sebelumnya, digambarkan sebagai hak masyarakat untuk berpartisipasi dalam menentukan agenda dan urutan prioritas program bagi dirinya atau kelompoknya. Partisipasi, menurut definisi, adalah proses pembangunan sosial di mana individu, sebagai subjek di lingkungan mereka sendiri, mencari strategi untuk memenuhi tujuan dan harapan kolektif mereka untuk mengatasi tantangan bersama.

Partisipasi sangat penting bagi keberhasilan PKK; Partisipasi masyarakat adalah mekanisme di mana semua pihak masyarakat dapat mengatur dan terlibat dalam semua proyek pembangunan. Selanjutnya, partisipasi masyarakat diartikan sebagai keterlibatan masyarakat dalam semua tahapan proses pembangunan yang ada dalam suatu kelompok masyarakat, dimulai dengan menganalisis keadaan, merencanakan, melaksanakan dan mengelola, memantau dan mengevaluasi, serta menentukan pembagian manfaat pembangunan yang dilakukan secara adil, dalam arti masyarakat tidak hanya menjadi peserta dalam program PKK, tetapi juga bertanggung jawab atas perkembangan PKK.

Karena PKK telah terbukti menghasilkan masyarakat yang sejahtera, maka keberhasilan suatu program PKK tidak dapat dipisahkan dari keterlibatan masyarakat, baik sebagai unit sistem maupun sebagai komunitas yang merupakan komponen penting dari program PKK. Alhasil, masyarakat ikut bertanggung jawab atas berhasil atau tidaknya program PKK, begitu juga dengan tim penggerak PKK. Untuk mewujudkan program PKK di Kelurahan Wandoka Utara yang memenuhi kebutuhan masyarakat, setiap komponen masyarakat harus dilibatkan, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan dan pengawasan.

Keberhasilan program PKK tidak lepas dari keterlibatan anggota masyarakat, baik sebagai unit sistem maupun sebagai orang-orang yang menjadi aspek kunci dari program PKK karena upaya PKK telah terbukti membangun masyarakat yang sejahtera. Akibatnya, masyarakat, serta anggota PKK, berbagi tanggung jawab atas keberhasilan atau kegagalan program PKK. Keterlibatan masyarakat diperlukan di seluruh program PKK, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan hingga penilaian.

Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan

Ada tiga alasan utama mengapa partisipasi masyarakat dalam perencanaan (Bancin, 2011): pertama, sebagai langkah awal untuk mempersiapkan masyarakat untuk berpartisipasi dan sebagai cara untuk menumbuhkan rasa memiliki dan tanggung jawab masyarakat setempat terhadap program PKK yang dilaksanakan; kedua, sebagai alat untuk memperoleh informasi tentang kebutuhan, kondisi, dan kondisi; dan ketiga, sebagai alat untuk memperoleh informasi tentang sikap masyarakat. Ketiga, masyarakat berhak bersuara di mana program PKK dijalankan.

Menurut Pasal 1 ayat 41 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pelibatan masyarakat adalah pelibatan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam rangka menyalurkan maksud, pandangan, dan kepentingannya. Sebagai organisasi perempuan, PKK memiliki kewenangan menyelenggarakan kegiatan untuk memajukan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa dan kelurahan PKK. Keterlibatan masyarakat sangat penting dalam melaksanakan program PKK di desa, termasuk dalam tanggung jawab yang terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian.

Keterlibatan masyarakat secara penuh dalam proses perencanaan program melalui dialog kolaboratif; Selama sesi ini, pendapat dan saran masyarakat menjadi hal utama atau acuan dalam pengembangan program (Dewi et al., 2021). Partisipasi masyarakat mengacu pada keterlibatan masyarakat pada semua tahapan proses pembangunan. yang ada dalam suatu kelompok masyarakat, dimulai dengan analisis skenario, perencanaan, pelaksanaan dan administrasi, pemantauan dan evaluasi, dan penetapan alokasi manfaat pembangunan yang adil .

Selanjutnya, partisipasi masyarakat adalah suatu proses dimana warga sebagai individu, kelompok sosial, dan organisasi menyerap pesan dan aktif dalam proses perumusan dan pemantauan kebijakan yang secara langsung mempengaruhi aktivitas mereka. Sebagai konsekuensi dari keterlibatan masyarakat dalam mengembangkan program PKK di Kelurahan Wandoka Utara, maka dihasilkan formulasi program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan mampu menjawab tantangan hidup mereka.

Menurut studi lapangan, PKK di Kelurahan Wandoka Utara selalu mengikutsertakan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Setiap kali program diputuskan untuk dijalankan, masyarakat dilibatkan. Sebelum melakukan perencanaan, manajer melakukan analisis kebutuhan, yang nantinya akan menjadi pedoman untuk perencanaan program. Kehadiran dalam rapat, debat, penyampaian ide, jawaban atau penolakan terhadap rencana yang diberikan merupakan contoh pelibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan.

Keterlibatan masyarakat Kelurahan Wandoka Utara dapat ditunjukkan dengan berbagai cara, salah satunya melalui partisipasi dalam proses dialog rencana program PKK. Dalam skenario ini, penduduk Kelurahan Wandoka Utara melakukan program menjahit. Terlepas dari kenyataan bahwa orang-orang tertentu dalam proses perencanaan menentang karena masalah dengan kain yang akan digunakan. Sangat penting untuk bersedia berkontribusi pada keberhasilan setiap proyek PKK. Akibatnya, sangat penting untuk mengidentifikasi strategi untuk mendorong keterlibatan masyarakat non-fisik, seperti tujuan kehadiran dan distribusi, terutama selama tahap perencanaan dan pengambilan keputusan. Karena keterlibatan ini berfungsi sebagai stand-in bagi partisipasi masyarakat. Semakin besar potensi seseorang untuk menentukan nasib sendiri, semakin terlibat dalam program PKK. Salah satu Tim penggerak PKK menyatakan:

“Program PKK di Kelurahan Wandoka Utara pada hakikatnya merupakan hasil musrenbang yang dilakukan bersama masyarakat.” Secara langsung ide dan konsep program PKK pada awalnya merupakan bagian dari keterlibatan masyarakat Kelurahan Wandoka Utara, oleh karena itu masyarakat ikut serta dalam keadaan ini walaupun partisipasi mereka masih belum ada.”

Menurut temuan wawancara sebelumnya, masyarakat tampaknya terlibat dalam program PKK. Musrenbang di Kelurahan Wandoka Utara menunjukkan partisipasi masyarakat. Keberhasilan suatu program PKK, baik dari segi bentuk maupun hasil, tidak terlepas dari keputusan yang diambil, yaitu melalui tahapan pengambilan keputusan. Keterlibatan masyarakat

diperlukan pada tahap tertentu agar ide atau pendapat dapat dipertimbangkan.

Warga Kelurahan Wandoka Utara mulai merencanakan bagaimana rancangan program PKK ke depan akan dilakukan pada tahap perencanaan ini. Hal ini penting karena proses perencanaan merupakan alat yang digunakan untuk membantu membuat kebijakan dan mengelola transformasi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup di masa depan.

Hal ini sesuai dengan penuturan salah satu tokoh masyarakat: "Sebenarnya ada beberapa orang yang belum sepenuhnya mendukung tujuan PKK. Hal ini antara lain disebabkan oleh kurangnya komunikasi antara tim penggerak PKK dengan masyarakat, yang juga menyebabkan kurangnya komunikasi. partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembersihan lingkungan. Karena kurangnya kontak yang terjalin, sedikit informasi mengenai kebutuhan penduduk Kelurahan Wandoka Utara yang diperoleh."

Kurangnya komunikasi antara tim penggerak PKK dengan masyarakat, menurut hasil wawancara, berkontribusi pada rendahnya tingkat keterlibatan masyarakat. Padahal, partisipasi masyarakat dalam program PKK sangat erat kaitannya dengan modus pelibatannya.

Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan

Masyarakat aktif dalam proses implementasi dari awal hingga akhir, dengan penyampaian saran dan perspektif, komoditas, bakat, dan layanan. Keterlibatan masyarakat dalam operasi PKK sangat penting karena tanpa itu, inisiatif PKK yang sedang atau akan dilaksanakan di masa depan akan gagal. Inisiatif anggota masyarakat berangkat dari pengetahuan dan tanggung jawab mereka sebagai orang yang hidup dalam masyarakat dan diharapkan tumbuh dan berkembang sebagai bagian dari partisipasi mereka dalam memastikan keberhasilan program PKK. Tentunya ketua PKK menjadi motivator dalam pelaksanaan agenda PKK, sehingga pelibatan masyarakat didorong.

"Kesadaran kolektif mengacu pada keterlibatan masyarakat yang tidak dibayar dengan sukarela membantu," jelas ketua PKK Wandoka Utara. Tiga kriteria yang mempengaruhi keterlibatan masyarakat dalam program PKK: rasa memiliki, keterlibatan masyarakat dalam proses kegiatan PKK, dan kebutuhan masyarakat. Tidak layak untuk hidup di masyarakat, khususnya di Program PKK."

Berdasarkan data wawancara tersebut di atas, ada kelompok masyarakat yang dengan sengaja melakukan kegiatan walaupun tidak diberi uang kembalian. Ada tiga kriteria yang muncul dari keinginan kuat masyarakat untuk mengikuti kegiatan PKK: harus ada rasa memiliki, masyarakat terlibat dalam kegiatan PKK, dan masyarakat sering membutuhkan.

Ketua PKK mengharapkan kerjasama masyarakat berupa partisipasi dalam pembekalan kemampuannya dalam bentuk pemikiran dan keterampilan. Salah satu program kebersihan lingkungan menunjukkan keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaannya; masyarakat mempersiapkan segala sesuatunya sebelum program dimulai, dan keterlibatan masyarakat dalam mempersiapkan infrastruktur terlihat, dengan sukarelawan dengan sukarela membawa alat dan perlengkapan yang dibutuhkan untuk proses pelaksanaan program untuk mencapai tujuan. Selain itu, banyak ibu yang pada umumnya melakukan kegiatan kerajinan, termasuk menjahit.

Hal ini juga diungkapkan oleh salah satu tokoh masyarakat, "Jika ada yang ingin kami lakukan, seperti kegiatan pengabdian masyarakat dan menjahit, kami selalu membawa peralatan."

Berdasarkan temuan wawancara tersebut, ada komponen yang aktif mengikuti kegiatan PKK di Kelurahan Wandoka Utara, seperti membawa peralatan sendiri.

Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan

Banyak hasil program PKK dapat dianggap berhasil atau tidak, tergantung pada apakah mereka berharga bagi masyarakat dan memberikan manfaat yang sesuai dengan persyaratan kesejahteraan masyarakat.

Program PKK adalah kegiatan di mana pihak-pihak yang terlibat mencari informasi dalam pengembangan kegiatan atau program yang sedang berjalan, mencari informasi agar berjalan

sesuai waktu dan target yang ditetapkan, kemudian menilai aspek efisiensi dan relevansi program, termasuk dampaknya terhadap konteks pencapaian tujuan, baik positif maupun negatif.

Pemberdayaan masyarakat, di sisi lain, adalah metode di mana orang-orang sebagai individu, kelompok sosial, dan organisasi menerima pesan dan terlibat dalam proses perumusan dan pemantauan kebijakan yang secara langsung mempengaruhi kegiatan mereka (Alhadar et al., 2020). Evaluasi PKK di Kecamatan Wandoka Utara memberikan informasi penting yang dapat dimanfaatkan oleh pimpinan PKK untuk menentukan alternatif pertumbuhan organisasi. *Community member engagement* sebagai dalam pembangunan, yang meliputi kegiatan dalam merancang dan melaksanakan program atau proyek pembangunan yang dilakukan di masyarakat lokal (Dewi et al., 2021).

Partisipasi masyarakat dalam pengawasan program PKK adalah kegiatan dimana pihak-pihak yang terlibat mencari informasi dalam mengembangkan kegiatan atau program yang sedang berjalan, mencari informasi agar berjalan sesuai waktu dan target yang ditetapkan, dilanjutkan dengan penilaian aspek efisiensi dan relevansi program, termasuk dampaknya pada konteks pencapaian tujuan positif atau negatif.

Pemantauan program digunakan untuk memeriksa dan memastikan bahwa program sasaran telah dilaksanakan secara efektif dan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan untuk digunakan dalam pengambilan keputusan. Tingkat keterlibatan masyarakat dalam program PKK cukup kuat pada tahap pelaksanaan kegiatan menjahit. Karena masyarakat pertama-tama bekerja sama untuk memilih kegiatan yang akan dilakukan, dan kegiatan menjahit mengikuti pola yang telah ditentukan, keterlibatan masyarakat terbukti bermanfaat.

Menurut Ketua PKK, "usaha penjahitan di Kelurahan Wandoka Utara dimulai dari perencanaan dan berlanjut hingga tahap pelaksanaan selesai sesuai rencana." Dalam hal ini, dalam bahan yang digunakan, untuk memastikan bahwa teknik produksi memenuhi persyaratan saat ini."

Berdasarkan hasil wawancara di atas, kegiatan menjahit di Kelurahan Wandoka Utara sudah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Perencanaan mencontohkan homogenitas ini. Cara pelaksanaannya melibatkan masyarakat secara langsung karena tindakan PKK harus dibentuk atau dipilih oleh masyarakat. Salah satu bentuk pelibatan tersebut adalah keterlibatan aktif dalam bentuk monitoring aksi PKK. Tujuan pelaksanaan program adalah untuk mengkaji, menilai, dan menentukan sejauh mana tujuan telah tercapai.

Masyarakat dengan tingkat pendidikan yang rendah menjadi penghambat partisipasi masyarakat dalam Program PKK di Kelurahan Wandoka Utara sehingga sulit untuk memahami apa dan seberapa vital program tersebut. Karena misinformasi ini, muncul sikap apatis dan acuh tak acuh terhadap program PKK. Masyarakat dengan tingkat pengetahuan rendah yang kurang terlibat dalam proses perencanaan lebih bersemangat untuk berkontribusi pada masalah teknis seperti pengabdian masyarakat dan pemrograman.

Hambatan lainnya adalah jenis pekerjaan; Menurut penelitian penduduk Kelurahan Wandoka Utara, mayoritas penduduknya adalah petani, dan mereka boleh ikut serta ketika tidak sempat pergi ke kebun. Pekerjaan lain yang ditemukan dalam penelitian ini adalah pekerja kebun yang tidak bisa ditinggal sendiri dan harus menunggu waktu liburan, yang berdampak pada keterlibatan masyarakat. Pekerja kebun yang memetik rumput adalah pekerjaan lain yang ditemukan dalam penelitian ini yang tidak dapat sepenuhnya ditinggalkan dan harus menunggu waktu liburan, sehingga mengganggu keterlibatan masyarakat.

Pendidikan mewakili status sosial ekonomi penduduk desa, yang dapat mempengaruhi cara pandang dan perilaku/metode mereka. Pendidikan adalah salah satu faktor yang menyebabkan beragam perubahan di permukaan planet ini. Kenyataannya adalah bahwa ada hubungan yang kuat antara pencapaian pendidikan dan partisipasi masyarakat. Orang dengan tingkat pendidikan tinggi lebih cenderung memperhatikan kegiatan yang mereka ikuti, sedangkan orang dengan tingkat pendidikan rendah cenderung tidak memperhatikan suatu kegiatan.

Tingkat pendidikan penduduk Kelurahan Wandoka Utara yang rendah menjadi penghambat efektifitas program PKK. Perluasan pemikiran masyarakat sangat terbatas pada program-program yang dilakukan oleh tim penggerak PKK, seperti penyuluhan kegiatan menjahit; daya serap masyarakat agak kurang, sehingga hasil penyuluhan tidak maksimal. Masyarakat Kelurahan Wandoka Utara memiliki tingkat pendidikan yang rendah sehingga menyebabkan kurangnya keterlibatan masyarakat dalam program PKK Kelurahan Wandoka Utara.

Menurut temuan wawancara dengan tokoh masyarakat di Kecamatan Wandoka Utara, "tingkat pendidikan yang relatif rendah menjadi salah satu kendala bagi program PKK, khususnya bagi masyarakat Kabupaten Wandoka Utara". Mengapa demikian? Orang-orang dengan sedikit pengetahuan dapat memberikan lebih banyak daripada mereka dengan pendidikan yang baik karena mereka kurang berinvestasi dalam program."

Berdasarkan hasil wawancara sebelumnya, dapat diprediksi bahwa seseorang dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi akan berkontribusi lebih banyak pada program PKK daripada orang dengan tingkat pendidikan yang lebih rendah.

4 Kesimpulan

Berdasarkan temuan dan analisis diatas, maka dalam penelitian ini ditarik kesimpulan bahwa keterlibatan masyarakat dalam mengimplementasikan inisiatif PKK di Kelurahan Wandoka Utara, dimulai dengan pengambilan keputusan dan melalui pelaksanaan, penilaian, dan penggunaan hasil. Selanjutnya, pelibatan masyarakat PKK dalam pelaksanaan program di Kelurahan Wandoka Utara dipisahkan menjadi dua bentuk fisik yaitu materi dan tenaga, dan dua bentuk non fisik yaitu pikiran. Begitupun ditemukan tingkat pendidikan dan jenis pekerjaan menjadi penghambat keterlibatan masyarakat dalam program besar PKK di Kelurahan Wandoka Utara.

Referensi

- Alhadar, H., Suhu, B. La, Wance, M., & ... (2020). Pemberdayaan Kelompok Usaha Kecil Masyarakat Desa Madopolo Melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (Pnpm) Mandiri. *Jurnal Government Of ...*, 1(2), 25-31. <http://www.jurnal.umm.ac.id/index.php/jgoa/article/view/501%0Ahttp://www.jurnal.umm.ac.id/index.php/jgoa/article/download/501/333>
- Bancin, M. H. (2011). Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan (Studi Kasus: Bandung Barat). *Journal of Regional and City Planning*. <https://doi.org/10.5614/jpwk.2011.22.3.2>
- Dewi, L. S., Tan, F., & Nazer, M. (2021). Faktor-Faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam perencanaan tata ruang Kota Bukittinggi. *Region: Jurnal Pembangunan Wilayah Dan Perencanaan Partisipatif*, 16(2), 213. <https://doi.org/10.20961/region.v16i2.39852>
- Dzikrillah, A. B., & Ansori, A. (2018). Peran Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Perempuan Melalui Gerakan Pkk Di Desa Cihanjuang. *Comm-Edu (Community Education Journal)*, 1(3), 7. <https://doi.org/10.22460/comm-edu.v1i3.2080>
- Hertika, A. M. S., Fadjar, M., Permanasari, S. W. A., & Nugroho, B. A. (2021). Program pemberdayaan PKK melalui program pengembangan sistem akuaponik di Desa Ampeldento, Karangploso, Malang. *Riau Journal of Empowerment*, 4(2), 83-94. <https://doi.org/10.31258/raje.4.2.83-94>
- Lawelai, H. (2021). Sosialisasi Desa Sehat pada Karang Taruna. In *Humanism: Jurnal Pengabdian Masyarakat* (Vol. 2, Issue 1, p. 1). <https://doi.org/10.30651/hm.v2i1.5774>

- Lebetubun, J. (2022). Partisipasi Perempuan dalam Perencanaan Pembangunan di Ohoi Elaar Lamagorang Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan Maluku Tenggara. *Journal of Government Science Studies*, 1(1), 28–37. <https://doi.org/10.30598/jgssvol1issue1page28-37>
- Masyarakat, B. (2021). Jenis partisipasi masyarakat di perkampungan budaya betawi setu babakan, Jakarta selatan dalam bentuk pariwisata berbasis masyarakat. *TURN JOURNAL*, 1(1). <http://journal.unas.ac.id/turn/article/view/1432>
- Mulyati, M., & Suhaety, Y. (2021). Peranan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan di Desa Matua Kecamatan Woja Kabupaten Dompu. *Ainara Journal (Jurnal Penelitian Dan PKM Bidang Ilmu Pendidikan)*, 2(3), 288–294. <https://doi.org/10.54371/ainj.v2i3.94>
- Nastia, N., Lawelai, H., Hasimin, H., & Darni, D. (2022). Empowerment of PKK mothers through entrepreneurial skills education training. *Community Empowerment*, 7(2), 393–399.
- Pathony, T. (2020). Proses Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Kabupaten Subang. In *Ijd-Demos* (Vol. 1, Issue 2). scholar.archive.org. <https://doi.org/10.31506/ijd.v1i2.23>
- Prasetyaningsih, T. (2020). Strategi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh di RW 07 Kelurahan Kampung Melayu Jakarta Timur. *Jurnal Teknik ITS*. <https://repository.its.ac.id/79826/>
- Salma, S., Wijaya, A. A. M., Basir, M. A., & Lawelai, H. (2022). Community Based Tourism in The Development of Sustainable Tourism in Baubau City. *APLIKATIF: Journal of Research Trends in Social Sciences and Humanities*, 1(1), 28–38.
- Sugiono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D. In *Bandung: Alfabeta*.
- Sunaryo, A. (2020). Implementasi Pemberdayaan Pendidikan Melalui 10 Program Pokok PKK. *Journal Public Service and Governance*, 1(2), 253–278. <http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/psgj/article/view/1565>